

Analisis Penerapan PSAK 103 Terbaru Pada Laporan Keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Tahun 2024

Aryanto Nur¹, Dewi Oktapiani², Aniesa Qinarnayla I.³, Utsula Safana⁴, Mutia Indiani⁵, Hanifa Humairo⁶, Nayla Davina P.⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika,

email korespondensi: aryantonur@gmail.com, dewioktapiani418@gmail.com, qinarinaya@gmail.com, azkaulsulasafana@gmail.com, mutiaindiani18@gmail.com, hanifahumairo175@gmail.com, nayladavina275@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 14/05/2025

Revised 14/05/2025

Accepted 15/05/2025

Abstract

Given the provisions regarding accountability and transparency in the financial sector and the importance of financial statements prepared by non-profit organizations, this study discusses financial reporting based on Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Financial Accounting Standards (SAK), and approaches in determining standards to be analyzed more deeply, particularly the application of the latest Financial Accounting Standards Statements (PSAK). This research examines the financial statements of The Mizuho Leasing Indonesia Company, Tbk., with a specific focus on the implementation of the latest PSAK 103. The objective of this study is to understand the preparation, format, structure, and content of the company's financial statements, with an emphasis on how the latest PSAK 103 is applied to the financial reporting of The Mizuho Leasing Indonesia Company, Tbk. This research uses a qualitative method with data collection carried out through literature study. The research object is based on secondary sources using a descriptive approach, specifically the 2024 financial statements of The Mizuho Leasing Indonesia Company, Tbk. The findings of this study highlight the application of the latest PSAK 103 at The Mizuho Leasing Indonesia Company, Tbk., focusing on business combinations conducted through the formation of a new enterprise, where The Mizuho Leasing Indonesia Company, Tbk. controls the merged entity, transfers net assets, and dissolves one or more companies.

Keywords: Financial statements, financial accounting standards statement, business combinations

Abstrak

Ketentuan-ketentuan atas akuntabilitas dan transparansi pada sektor keuangan serta pentingnya laporan keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba, maka pembahasan mengenai laporan keuangan yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), Standar Akuntansi (SAK), dan pendekatan dalam penentuan standar untuk dianalisis secara lebih mendalam lagi khususnya pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang terbaru. Penelitian ini akan membedah laporan keuangan yang terdapat dalam Perusahaan Mizuho Leasing Indonesia Tbk. dan lebih berfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 103 terbaru. Tujuan dari penelitian ini tidak jauh untuk mengetahui penyusunan, bentuk, struktur, dan isi laporan keuangan pada Perusahaan tersebut dengan lebih berfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 103 terbaru pada laporan keuangan Perusahaan Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek penelitian ini berdasarkan pada sumber sekunder pendekatan deskriptif yang berupa laporan keuangan milik Perusahaan Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Tahun 2024. Hasil penelitian ini mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 103 terbaru pada Perusahaan Mizuho Leasing Indonesia Tbk. yang berfokus pada menyoroiti kombinasi bisnis yang dilakukan dengan pembentukan perusahaan baru (*new enterprise*) dimana Perusahaan Mizuho Leasing Indonesia Tbk. mengendalikan perusahaan yang bergabung, mengalihkan Aset neto, dan juga membubarkan satu atau lebih suatu perusahaan.

Kata Kunci: Laporan keuangan, pernyataan standar akuntansi, kombinasi bisnis.



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

PT Mizuho Leasing Indonesia TBK adalah perusahaan keuangan yang bekerja di bidang konsumen dan leasing. Awalnya, perusahaan ini dikenal sebagai PT Maxima Perdana Finance. Perusahaan ini didirikan pada 21 Juli 1993, Notaris Jakarta Sri Nanning, S.H. Itu secara resmi didirikan di bawah pendirian No. 3 dari Perusahaan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mengalami berbagai perkembangan dan transformasi bisnis. Salah satunya adalah penggabungan usaha yang dilakukan untuk memperkuat posisi perusahaan di industri pembiayaan

nasional. Pada 10 Juli 2019, perusahaan menerima penjelasan yang efektif tentang Moritas *Financial Services (OJK)* dalam surat dari Dewan Direksi OJK, *Supervisor Chief Executive Officer* Pasar Modal S-1110/D.0/2019. Pernyataan ini menandakan bahwa penggabungan usaha telah disetujui secara resmi. Informasi mengenai penggabungan ini pun telah diumumkan kepada publik melalui media cetak pada tanggal 5 Agustus 2019, sebagai bagian dari kewajiban transparansi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Setelah melalui proses tersebut, nama perusahaan berubah menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, yang kini menjadi bagian dari grup keuangan internasional Mizuho, asal Jepang. Hal ini menjadikan perusahaan memiliki dukungan kuat dari sisi permodalan, jaringan global, serta praktik bisnis yang modern dan terpercaya.

PT Mizuho Leasing Indonesia TBK 31 Cabang TBK 31 Indonesia di berbagai kota besar di Indonesia saat ini menyebar. Kehadiran cabang-cabang ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjangkau dan melayani lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah. Kantor pusat perusahaan berkasi di kawasan bisnis strategis Jakarta, tepatnya di Menara Astra, Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6. Jakarta Pusat 10220. Lokasi ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas perusahaan, tetapi juga memudahkan akses bagi mitra dan nasabah dari berbagai latar belakang. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri keuangan, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk terus berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang kompetitif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perusahaan juga berfokus pada pengembangan teknologi serta peningkatan layanan agar tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan zaman.

Perusahaan menyiapkan laporan keuangan mereka menggunakan seperangkat prinsip, standar, dan prosedur akuntansi legitimate, teoretis, dan praktis yang dikenal sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau GAAP. Tujuannya adalah untuk memastikan laporan keuangan perusahaan akurat, konsisten, dan dapat diperbandingkan. Ada dua pedoman yang membentuk PABU: pedoman yang secara resmi ditetapkan oleh badan yang berwenang sebagai standar akuntansi, atau pedoman yang baik dan umum digunakan serta dapat digunakan sebagai referensi jika tidak bertentangan dengan kerangka kerja konseptual atau mendapat dukungan yang sah. Isi PABU sebagai landasan untuk pedoman elemen-elemen kerangka kerja pedoman dikelompokkan secara hirarkis menurut tingkat konseptual dan otoritatif. Berbagai versi PABU telah muncul sebagai hasil dari perubahan kerangka kerja pedoman ini untuk memenuhi harapan pengguna dapat mengevaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan analisis laporan keuangan tersebut tanpa adanya ketidakpastian mengenai makna dan signifikansi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan jika subjek yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan tersebut telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PABU. Hal ini mengimplikasikan bahwa penyaji dan pembaca yang menjadi sasaran laporan telah melakukan komunikasi yang baik. Tentu saja, jika pembaca mengevaluasi angka-angka keuangan dengan menggunakan kerangka kerja PABU yang sama, komunikasi yang sukses akan terjadi. Namun, masalahnya adalah siapa yang dapat memastikan bahwa penyusun laporan telah menyajikan laporan mereka sesuai dengan PABU, mengingat pengguna tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk memastikan kesesuaian tersebut, pihak ketiga—seperti inspektor independen atau akuntan Publik—harus dilibatkan. Oleh karena itu, PABU berfungsi sebagai pedoman bagi evaluator dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pernyataan "... menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum" dalam paragraf opini laporan audit standar mencerminkan pentingnya PABU. PABU di Indonesia masih dalam proses konvergensi dengan *Universal Monetary Announcing Benchmarks (IFRS)*, yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan standar akuntansi *worldwide*. Tujuan dari konvergensi ini adalah untuk memungkinkan penerimaan di seluruh dunia atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama untuk bisnis yang terlibat dalam operasi lintas batas. Kualitas, komparabilitas, dan transparansi laporan keuangan Indonesia dapat meningkat sebagai hasil dari konvergensi ini, sehingga memberikan kepastian yang lebih besar bagi otoritas keuangan internasional dan *financial specialist* asing. Meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, standar akuntansi syariah seperti PSAK 103 dan PSAK 110 tetap dimasukkan dalam kerangka PABU Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) menciptakan standar-standar ini, yang secara resmi berlaku sebagai komponen dari sistem standar nasional. Dengan demikian, penggunaannya tidak terbatas pada entitas syariah saja; bisnis tradisional yang melakukan transaksi berdasarkan kontrak syariah juga dapat menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan komponen penting dari PABU yang dapat diperluas cakupannya sesuai dengan perkembangan permintaan pasar dan jenis transaksi keuangan, dan tidak berdiri sendiri sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri. Jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak terpengaruh secara material oleh penerapan PSAK baru/revisi ini, dan juga tidak mengakibatkan perubahan pada praktik akuntansi perusahaan. Sebagai produk akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan ringkasan perubahan situasi keuangan perusahaan serta kondisi dan hasil saat ini. Aturan akuntansi harus diikuti saat membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan harus transparan dan jujur untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Untuk menghindari kesalahan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan, menurut Raymond Budiman (2020:3), adalah dokumen yang merinci keadaan keuangan perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. “Laporan keuangan adalah hasil pencatatan dari semua transaksi keuangan yang ada di perusahaan,” kata Toto Prihadi (2020:8). Menurut sifat-sifat ekonominya, transaksi-transaksi yang digambarkan dalam laporan keuangan dikategorikan ke dalam beberapa pengelompokan yang cukup besar. Laporan keuangan berisi kategori-kategori besar ini. Pendapatan dan beban merupakan komponen laporan keuangan yang terkait dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi, sedangkan aset, liabilitas, dan ekuitas merupakan komponen yang terkait langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Berbagai komponen laporan laba rugi dan perubahan pada berbagai komponen neraca tercermin dalam laporan perubahan posisi keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, komponen-komponen laporan perubahan posisi keuangan tidak diidentifikasi secara eksplisit oleh kerangka dasar ini. Menurut PSAK 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna mengenai arus kas, kondisi keuangan, dan kinerja keuangan entitas sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang tepat.

Standar Akuntansi Keuangan, atau SAK, adalah arrange dan teknik yang ditetapkan untuk melaporkan laporan keuangan bisnis, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Di sisi lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang sering dikenal sebagai PSAK, adalah standar akuntansi yang menetapkan bagaimana laporan keuangan harus dicatat, disusun, dilakukan, dan disajikan. Akibatnya, semua entitas perusahaan diharuskan untuk melakukan pencatatan akuntansi, termasuk pencatatan laporan keuangan, dan mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mewakili komunitas akuntansi di Indonesia, mengatur bagaimana laporan keuangan harus disajikan secara keseluruhan. Agar laporan keuangan perusahaan lebih mudah dipahami, relevan, dapat dipercaya, dan memiliki daya banding yang tinggi, PSAK 1 dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dan menstandarkan penyajiannya.

Metode akuntansi didasarkan pada kerangka kerja konseptual, yang terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktik yang telah diterima secara luas karena kepraktisan dan rasionalitasnya. Hal ini dikenal sebagai standar akuntansi, dan sebelumnya dikenal sebagai Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) sebelum berganti nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah nama baru untuknya.

Standar akuntansi adalah kebiasaan, aturan, dan praktik yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Badan Penetapan Standar pada waktu tertentu. Pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan sumber daya ekonomi, kewajiban, modal, hasil, beban, dan perubahan dalam bentuk laporan keuangan, semuanya tercakup dalam standar ini, yang merupakan konsensus atau kesepakatan bersama. Standar ini menetapkan transaksi-transaksi yang perlu dinilai, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan yang akan disediakan.

Organisasi resmi yang dihormati oleh publik, profesi, dan pemerintah biasanya membuat standar akuntansi ini. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang beroperasi di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), adalah badan yang berwenang untuk menyusun informasi ini di Indonesia. Kongres IAI akan memutuskan dan mengesahkan hasil akhir setelah melakukan dengar pendapat dan diskusi dengan para akademisi dan profesi. Sebaliknya, *Financial Accounting Standard Board* (FASB), yang independen dari pengaruh profesi, adalah organisasi di Amerika Serikat yang memiliki wewenang untuk mengesahkan Standar Akuntansi (*Standard Setting Body*).

Profesi dan semua pengguna laporan yang tertarik dengan hal ini menganggap standar akuntansi sebagai masalah yang signifikan. Oleh karena itu, proses pembuatan standar akuntansi perlu dibuat untuk memuaskan semua orang yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Ketika masyarakat dan lingkungan berevolusi dan memenuhi tuntutan baru, standar akuntansi ini juga akan terus berevolusi.

Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap akuntan pasti akan berpedoman pada standar akuntansi. Standar ini sangat penting karena memberikan panduan tentang bagaimana akuntan seharusnya mencatat, melaporkan, dan menyusun laporan keuangan. Namun, standar-standar ini tidak bersifat tetap—mereka bisa berubah, diperbarui, dihapus, atau ditambahkan, baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain. Tujuannya adalah agar standar tersebut tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dengan adanya standar ini, pekerjaan akuntan menjadi lebih jelas dan terarah karena mereka memiliki petunjuk yang praktis dan mudah diikuti.

Standar akuntansi biasanya terdiri dari tiga bagian utama:

1. Penjelasan masalah – Bagian ini menjelaskan masalah atau situasi yang perlu diselesaikan melalui standar akuntansi.
2. Pembahasan dan pertimbangan – Di bagian ini dijelaskan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa dengan merujuk pada teori akuntansi, praktik yang ada, atau pendekatan lain yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.



- Keputusan akhir atau solusi – Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, bagian ini memberikan keputusan atau aturan resmi yang akan menjadi pedoman dalam praktik akuntansi.

Dalam menyusun standar akuntansi, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- Standar akuntansi menyediakan informasi penting bagi pemerintah. Informasi ini bisa digunakan dalam hal perpajakan, pengaturan perusahaan, perencanaan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan juga untuk mencapai tujuan sosial tertentu.
- Standar akuntansi juga menghasilkan prinsip dan teori penting yang berguna bagi banyak pihak, seperti akuntan, dosen, mahasiswa, investor, dan perusahaan. Karena menyangkut banyak kepentingan, tidak heran kalau standar akuntansi sering menimbulkan perdebatan atau pro dan kontra di kalangan praktisi dan akademisi. Tapi ini sebenarnya hal yang sehat dan lebih baik daripada tidak ada diskusi sama sekali.
- Standar akuntansi disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi, dan masyarakat umum. Di Indonesia, standar ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain DSAK, ada juga lembaga-lembaga lain yang ikut berperan dalam proses penyusunan standar.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia, termasuk penerapan PSAK 103 (Kombinasi Bisnis) dan PSAK 110 (Laporan Keuangan Dana Tabarru'). Apabila dianalisis dari sudut pandang teori akuntansi sebagaimana dibahas dalam buku Teori Akuntansi karya Hamonangan Siallagan (2020), khususnya pada halaman 70 mengenai pendekatan dalam penentuan standar akuntansi, maka pendekatan yang relevan digunakan oleh PT Mizuho meliputi Pendekatan Entitas atau Teori Entitas melihat perusahaan sebagai sebuah pihak yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemilik modal (seperti investor atau pemegang saham). Jadi, dalam pendekatan ini, fokus utama bukan pada kepentingan pemilik, tapi pada perusahaan itu sendiri sebagai satu kesatuan atau unit usaha yang independen. Artinya, perusahaan dianggap memiliki sendiri harta (aset) dan utangnya (kewajiban). Semua sumber daya dan tanggungan dalam perusahaan adalah milik perusahaan, bukan milik pemiliknya langsung, walaupun pemilik menanamkan modal ke dalam perusahaan. Karena itu, jika kita menggunakan pendekatan ini, persamaan dasar akuntansinya adalah:

$$\Sigma \text{Aset} = \Sigma \text{Hutang} + \Sigma \text{Modal}$$

Penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan keberlanjutan dan tanggung jawab entitas secara menyeluruh, termasuk dalam proses akuisisi dan penggabungan usaha seperti yang terjadi pada pengambilalihan PT IBJ Verena Finance (IBJV). Fokus pada penyajian informasi yang akurat dan konsisten tentang posisi keuangan dan aktivitas ekonomi entitas anak dan induk pasca-penggabungan. PT Mizuho menunjukkan penerapan pendekatan ini melalui:

- Pendekatan Etika dan Keadilan

Penerapan PSAK Syariah seperti PSAK 110 menunjukkan bahwa PT Mizuho mempertimbangkan prinsip-prinsip etis dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Hal ini mencerminkan:

 - Kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
 - Penyajian laporan keuangan dana tabarru' sebagai bentuk pengelolaan amanah yang adil dan akuntabel.
- Pendekatan Otoritatif (Regulatif)

Meskipun tidak disebutkan eksplisit, dokumen menunjukkan bahwa PT Mizuho mengikuti standar yang ditetapkan oleh IAI dan mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencerminkan:

 - Kepatuhan pada pendekatan otoritas sebagai dasar penetapan dan penerapan standar.
 - Validasi terhadap kombinasi usaha dan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan informasi menggunakan studi literatur. Objek penelitian ini didasarkan pada sumber sekunder pendekatan deskriptif yang berupa laporan keuangan milik PT. Mizuho Renting Indonesia Tbk. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7), metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan *information* yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. *Information* yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. *Information* literatur yang diperoleh dan dianalisis

mengacu pada pemahaman penulis yang berfokuskan pada PSAK terbaru yang sedang diberlakukan pada saat ini untuk menggambarkan keadaan sebenarnya laporan keuangan PT. Mizuho Renting Indonesia Tbk.

Dalam penelitian ini, teknik perekaman data dilakukan sebagai sumber utama menggunakan data sekunder. Ini berarti bahwa para peneliti menerima informasi langsung dari sumber lain yang ada, bukan dari orang pertama atau subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder adalah data yang tidak diterima langsung dari responden atau objek penelitian, tetapi dikumpulkan oleh perantara seperti dokumen, laporan, arsip, buku, majalah, artikel, atau data yang sebelumnya dikumpulkan oleh pihak lain.

Penggunaan data sekunder ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan informasi pendukung yang melengkapi data primer, atau bahkan bisa menjadi dasar awal dalam menyusun kerangka teori dan latar belakang penelitian. Data semacam ini biasanya lebih mudah diakses dan sudah dalam bentuk yang rapi atau tersusun, sehingga membantu peneliti dalam memahami topik yang sedang dikaji dari berbagai sudut pandang.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh, karena informasi yang digunakan tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi didukung oleh berbagai literatur dan referensi terpercaya. Dengan begitu, hasil penelitian menjadi lebih kuat secara akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penjelasan secara mendalam mengenai sak pada laporan keuangan yang telah sesuai dengan prinsip PSAK.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Terdapat beberapa penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan dasar PSAK terbaru 2025 di antara, Kombinasi Bisnis pada PSAK Nomor 103, pada PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

PSAK terbaru yaitu pada tahun 2025 mengadopsi IFRS 3 *business combinations* dan mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi dimana satu entitas memperoleh kendali atas bisnis lain. Bertujuan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, mencerminkan substansi ekonomi dari akuisisi, dan meningkatkan keterbandingan antar entitas.

Awalnya dari IAS 22 Standar akuntansi untuk kombinasi bisnis pertama kali diatur dalam IAS 22 yang diterbitkan tahun 1983 dan direvisi pada tahun 1998. Digantikan oleh IFRS 3 Pada Maret 2004, IAS 22 dan tiga interpretasi terkait digantikan oleh IFRS 3. Standar baru ini memberikan aturan yang lebih jelas tentang bagaimana mencatat penggabungan usaha. IFRS 3 mengalami perubahan kecil karena penyesuaian dengan standar lain seperti IFRS 5 (tentang aset yang dijual) dan IAS 1 (tentang penyajian laporan keuangan). IFRS 3 diterbitkan pada Januari 2008 dengan banyak perbaikan untuk memperjelas aturan tentang akuntansi penggabungan usaha.

Amandemen Definisi Bisnis (2018). Amandemen Referensi Kerangka Konseptual (2020). Isi IFRS 3 disesuaikan agar sesuai dengan kerangka konsep akuntansi yang diperbarui, sekaligus mencegah efek yang tidak diinginkan dari perubahan itu. Amandemen lain dari standar terkait. IFRS 3 juga beberapa kali diperbarui secara kecil-kecilan karena penyesuaian dari standar lain seperti IFRS 9 (instrumen keuangan), IFRS 10 (konsolidasi), IFRS 13 (nilai wajar), IFRS 15 (pendapatan), IFRS 16 (sewa), dan IFRS 17 (asuransi), sampai yang terbaru IFRS 18 (2024). IFRS 3 terus dikembangkan agar tetap relevan, jelas, dan sesuai dengan perubahan dalam standar akuntansi internasional lainnya.

IFRS 3 adalah standar akuntansi yang mengatur bagaimana perusahaan mencatat dan melaporkan ketika mereka mengakuisisi atau membeli perusahaan lain. Secara garis besar, aturan ini mengharuskan perusahaan yang membeli (pihak pengakuisisi) untuk:

1. Mencatat semua aset dan utang yang diperoleh dari perusahaan yang dibeli, termasuk bagian kepemilikan pihak lain jika ada, berdasarkan nilai pasar saat ini (nilai wajar).
2. Menghitung dan mencatat selisih antara harga beli dan nilai bersih aset yang diperoleh. Jika harga beli lebih tinggi, selisihnya disebut *goodwill* (niat baik). Jika harga beli lebih rendah dari nilai aset bersih, maka selisihnya disebut pembelian murah, dan itu langsung dicatat sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi.
3. Memberikan informasi yang jelas dalam laporan keuangan, supaya pengguna laporan (investor, kreditor, dll.) bisa memahami apa yang dibeli, kenapa dibeli, dan dampaknya terhadap keuangan perusahaan.

Kombinasi Bisnis adalah suatu peristiwa dimana suatu pihak memegang dan mengelola suatu bisnis. Hal ini bisa berawal dari kerja sama yang lama kelamaan pengelolannya dipegang oleh pihak yang bekerja sama.

Kombinasi bisnis dapat dilakukan melalui:

1. Pembelian Aset (*Asset Acquisition*)

Metode dimana suatu perusahaan membeli Aset (aset) milik suatu perusahaan yang lain. Contohnya seperti pembelian gedung, mesin, hak paten/merek, dan lain-lain. Ciri khas dari kombinasi bisnis melalui pembelian Aset:

- a. Transaksi atau pembelian hanya terjadi untuk aset bukan dalam bentuk saham ataupun struktur perusahaan.

- b. Perusahaan yang membeli aset tidak secara otomatis bergabung dengan perusahaan yang dibeli hanya saja asetnya yang dialihkan pada perusahaan yang membeli.
- c. Kombinasi bisnis ini cocok untuk bisnis yang hanya tertarik pada bagian tertentu perusahaan.

2. Pembentukan Perusahaan Baru (*New Enterprise*)

Metode ini juga disebut Konsolidasi, yaitu dimana kombinasi bisnis satu dan lainnya bersatu dan untuk bisnis lama akan dibubarkan. Setelah dibubarkan seluruh aset dan kewajiban mereka dialihkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Perusahaan baru ini yang akan meneruskan kegiatan bisnis. Ciri khas dari kombinasi bisnis melalui pembentukan perusahaan baru:

- a. Perusahaan lama akan menghilang
- b. Terbentuknya suatu perusahaan secara hukum
- c. Kepemilikan saham biasanya didistribusikan kepada pemilik lama dari perusahaan yang bergabung

Tabel 1 Perbedaan Antara Metode Pembelian Aset Dan Pembentukan Perusahaan Baru

Metode	Fokus Utama	Status Entitas Lama	Entitas Baru
Pembelian aset	Pembelian aset entitas	Tetap ada / tidak dibubarkan	Tidak ada
Pembentukan entitas baru	Penggabungan penuh dan pembentukan entitas baru	Dibubarkan	ada

Sumber: data diolah penulis, 2025.

Tujuan dari kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai strategi dalam mengelola perusahaan agar dapat bersaing di perdagangan global dan bertahan dari setiap masalah yang mungkin saja terjadi. dengan kombinasi bisnis perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku yang mungkin saja habis, memperoleh fasilitas yang dibutuhkan bagi perusahaan. Ketersediaan bahan baku dan fasilitas memadai memungkinkan perusahaan untuk berkembang. Dan menguatkan faktor produksi suatu perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaan dengan perusahaan yang telah berpengalaman.

Jenis kombinasi bisnis menurut PSAK 22 berdasarkan cara penggabungannya:

1. Akuisisi (*Acquisition*)

Akuisisi adalah proses pengambilalihan satu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan akuisisi disebut pengakuisisi (*acquirer*), dan perusahaan yang diambil alih disebut perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*).

Perusahaan pengakuisisi bisa mendapatkan kendali atas perusahaan yang diakuisisi dengan berbagai cara, misalnya dengan:

- a. Menyerahkan sejumlah aset (uang tunai, properti, dll.),
- b. Mengambil utang atau kewajiban tertentu,
- c. Atau dengan menerbitkan saham baru.

Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan pengakuisisi bisa mengendalikan aset dan operasional dari perusahaan yang diakuisisi.

2. Penyatuan Kepentingan (*Uniting of Interest*)

Penyatuan kepentingan adalah bentuk penggabungan dua perusahaan tanpa ada pihak yang "mengambil alih". Dalam hal ini, kedua perusahaan sepakat untuk bergabung secara setara. Para pemegang saham dari kedua perusahaan akan:

- a. Berbagi kepemilikan dan kendali atas perusahaan baru yang terbentuk dari penggabungan tersebut,
- b. Menanggung risiko dan menikmati manfaat bersama-sama dari hasil penggabungan.
- c. Karena tidak ada satu pihak pun yang sepenuhnya mengendalikan pihak lainnya, maka tidak ada yang disebut sebagai pengakuisisi dalam penggabungan jenis ini.

Bentuk Kombinasi dibedakan berdasarkan sifat penyatuan:

Tabel 2 Bentuk Kombinasi Berdasarkan Sifat Penyatuan

Berdasarkan	Horizontal	Vertikal	Konglomerasi
Bentuk usaha	Jenis usaha sama	Jenis usaha berbeda tapi saling berhubungan	Jenis usaha berbeda dan tidak berhubungan
Tujuan	1. Mengurangi pesaing 2. Kuasai pasar 3. Biaya lebih efisien 4. Skala membesar 5. Lebih kuat dan hemat	1. Hemat dan efisien 2. Kualitas terjamin 3. Biaya lebih murah	1. Menyebarkan risiko 2. Menambah Volume 3. Uang masuk stabil 4. Keuntungan dari berbagai arah

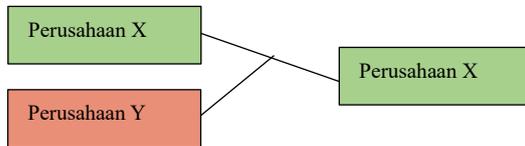
Sumber: data diolah penulis, 2025.

Bentuk Kombinasi Bisnis dapat dibedakan berdasarkan aspek hukum:

1. Merger (Peleburan)

Peristiwa dimana suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain dan untuk perusahaan yang diambil alih akan kehilangan status dengan dibubarkan (*dissolve*)

Konsep 1
Contoh Merger

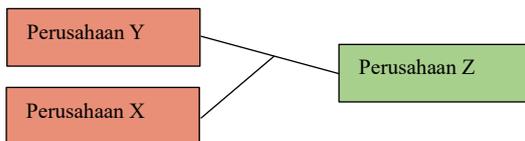


Sumber: <https://id.scribd.com/document/780208814/KOMBIS> , dan diolah penulis, 2025.

2. Konsolidasi (Penggabungan)

Ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dan membentuk perusahaan baru dan untuk semua perusahaan lama di tutup dan muncullah perusahaan baru.

Konsep 2
Contoh Konsolidasi

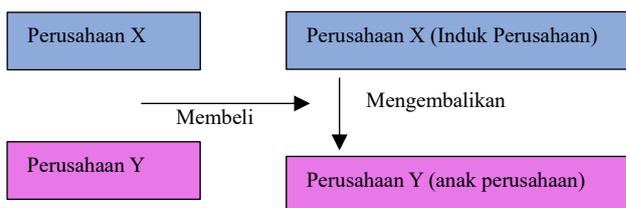


Sumber: <https://id.scribd.com/document/780208814/KOMBIS> , dan diolah penulis, 2025.

3. Akuisisi (Pengambilalihan)

Ketika suatu perusahaan membeli aset dan secara langsung mengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aset yang dibeli dari suatu perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang dibeli tidak ditutup tapi dikendalikan oleh perusahaan yang membeli perusahaan tersebut.

Konsep 3
Contoh Akuisisi



Sumber: <https://id.scribd.com/document/780208814/KOMBIS> , dan diolah penulis, 2025.

Cara mencatat kombinasi bisnis dengan metode akuisisi dengan langkah-langkah berikut:

1. Pihak Pengakuisisi

Perusahaan yang membeli/mengambil alih/menguasai perusahaan lain. Pihak yang nantinya akan memberikan aset, mengeluarkan saham, bahkan menanggung hutang. Ukuran perusahaan pengakuisisi lebih besar dibandingkan perusahaan yang diakuisisi.

2. Penentuan Tanggal Akuisisi

Saat pembeli secara hukum mengambil alih kendali atas aset dan utang pihak yang dibeli.

3. Catatan ukur aset dan utang dari perusahaan yang dibeli

4. Catat *Goodwill*

Selisih lebih yang dibayar atau keuntungan dari pembelian murah. *Goodwill* muncul jika harga yang dibayar lebih besar dari nilai bersih aset yang diperoleh. Jika harga yang dibayar untuk akuisisi lebih besar dari nilai wajar aset bersih yang diakuisisi, selisihnya diakui sebagai *goodwill*. Jika sebaliknya, maka diakui sebagai keuntungan dari transaksi yang menguntungkan.

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis merupakan selisih antara:

- Harga yang dibayar (*consideration transferred*).
- Nilai wajar aset yang diperoleh.
- Nilai wajar liabilitas yang diambil alih.
- *Goodwill* tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilai (*impairment*) secara tahunan.

Kombinasi bisnis dapat mempengaruhi laporan keuangan entitas secara signifikan:

1. Posisi Keuangan: Pengaruh pada aset, liabilitas, dan ekuitas.
2. Laba Rugi: Potensi dampak positif atau negatif terhadap laba rugi yang disebabkan oleh pengakuan goodwill atau keuntungan dari transaksi yang menguntungkan.
3. Pengungkapan: Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas mengenai transaksi yang terjadi, baik yang terkait dengan harga akuisisi, aset yang diperoleh, maupun kewajiban yang diambil alih.

Mengontruksi Laporan Keuangan pada PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

Perusahaan melakukan beberapa strategi pengembangan untuk mencapai suatu tujuan baik di internal maupun eksternal. Salah satunya dengan melakukan kombinasi dengan satu atau lebih perusahaan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan PSAK Nomor 22 tahun 2015 IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010) sekarang dikenal dengan PSAK 103 yaitu tentang Kombinasi Bisnis, dimana terjadi kombinasi antara satu atau lebih perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Mizuho Leasing memiliki 20% saham di PT IBJ Verena Finance (IBJV), sebuah perusahaan yang juga bergerak di bidang pembiayaan. Kemudian, pada 25 Januari 2019, seluruh saham IBJV yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan induk Mizuho Leasing di Jepang (Mizuho Leasing Co., Ltd.) dialihkan ke PT Mizuho Leasing di Indonesia. Artinya, kepemilikan saham PT Mizuho Leasing atas IBJV meningkat dari 20% menjadi 100%, sehingga PT Mizuho Leasing menjadi pemilik penuh dan memiliki kendali atas IBJV. Sejak saat itu, IBJV resmi menjadi anak perusahaan dari PT Mizuho Leasing.

Untuk mengambil alih 80% saham tambahan tersebut, PT Mizuho Leasing membayar sekitar Rp214,3 miliar. Setelah dikurangi dengan kas yang dimiliki oleh IBJV, jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan oleh PT Mizuho Leasing adalah sekitar Rp117,1 miliar. Selisih nilai dari pembelian saham ini sebesar Rp32,99 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, pada 17 Juli 2019, melalui rapat pemegang saham, disetujui bahwa IBJV akan digabungkan secara resmi ke dalam PT Mizuho Leasing. Dengan penggabungan ini, IBJV tidak akan beroperasi lagi sebagai perusahaan terpisah, tetapi seluruh aset, kewajiban, kontrak, dan kegiatan usahanya akan diambil alih dan dilanjutkan oleh PT Mizuho Leasing. Karena ini merupakan penggabungan antara induk dan anak perusahaan (yang sahamnya 100% dimiliki), maka tidak ada perubahan dalam jumlah saham atau struktur modal perusahaan. Proses penggabungan ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan resmi berlaku sejak 23 Juli 2019. Izin usaha IBJV sebagai perusahaan pembiayaan juga telah dicabut pada tanggal yang sama. Kemudian, pada 5 Agustus 2019, PT Mizuho Leasing mengumumkan secara resmi hasil penggabungan ini di media massa sesuai aturan yang berlaku.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. telah melakukan kombinasi bisnis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 103 tentang kombinasi bisnis. Dalam kasus ini, kombinasi bisnis dilakukan dengan cara akuisisi, bukan melalui pembentukan perusahaan baru (*new enterprise*), tetapi melalui pengambilalihan kendali secara penuh atas PT IBJ Verena Finance (IBJV), yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi (dimiliki 20%).

Setelah memperoleh 100% saham IBJV dari perusahaan induknya di Jepang, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. secara resmi menjadi pemilik dan pengendali penuh IBJV. Proses ini disebut akuisisi karena PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. sebagai pihak yang mengakuisisi (*acquirer*), mengambil alih semua kendali operasional dan keuangan IBJV, baik melalui pengalihan aset bersih (Aset neto), pengakuan atas kewajiban, maupun pembayaran atas saham yang dibeli.

Dalam konteks ini, akuisisi dilakukan dengan membayar sejumlah dana untuk membeli sisa saham IBJV yang sebelumnya belum dimiliki. Karena PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. telah memiliki 20% saham sebelumnya, maka akuisisi ini meningkatkan kepemilikan menjadi 100%. Setelah akuisisi selesai, perusahaan kemudian melakukan penggabungan usaha dengan IBJV, di mana IBJV dibubarkan secara hukum tanpa melalui proses likuidasi. Semua aset, kewajiban, serta perjanjian-perjanjian IBJV beralih ke PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk., dan kegiatan usahanya pun dilanjutkan oleh perusahaan induk tersebut.

Dari sudut pandang hukum dan akuntansi, proses ini merupakan bentuk integrasi vertikal. Artinya, penggabungan dilakukan antara dua perusahaan yang mungkin berbeda dalam segmen atau pasar, tetapi masih berada dalam satu rantai kegiatan usaha yang sama—yaitu pembiayaan. Integrasi seperti ini bertujuan untuk memperkuat kendali, efisiensi, dan kelancaran kegiatan operasional karena semua layanan pembiayaan kini terpusat dalam satu perusahaan induk.

Sesuai dengan PSAK 103, kombinasi bisnis ini dikategorikan sebagai akuisisi, yakni ketika satu entitas mengambil alih kendali atas entitas lain, dengan memberikan aset tertentu, mengakui kewajiban, atau menerbitkan saham. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. telah menjalankan proses ini dengan cara membayar tunai kepada pemilik saham sebelumnya untuk mengambil alih seluruh saham IBJV. Karena struktur ini tidak melibatkan

pembentukan entitas baru dan tidak ada perubahan struktur modal yang berarti, maka penggabungan dilakukan secara internal dan tercatat sebagai bagian dari proses konsolidasi perusahaan.

Singkatnya, kita dapat mengatakan pt mizuho -leasing -indonesia -tbk -leasing -leasing. Kombinasi perusahaan dengan IBJV diimplementasikan sesuai dengan prinsip -prinsip dan peraturan yang ditentukan dalam PSAK 103. Proses Akuisisi dan Penggabungan Perusahaan telah disetujui oleh Biro Layanan Keuangan (OJK) untuk prosedur untuk memenuhi undang -undang yang berlaku dan peraturan akuntansi. Kombinasi perusahaan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menunjukkan kepatuhan dengan standar pelaporan keuangan terbaru Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis tersebut PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. telah menerapkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) secara konsisten, khususnya dengan mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru, termasuk PSAK 103. Data yang digunakan oleh PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2024 yang diperoleh melalui situs resmi dan laporan publikasi lainnya. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. melakukan kombinasi bisnis yang dimana dilakukan antar perusahaan perusahaan lainnya dalam mengelola perusahaan agar dapat bersaing diperdagangan global dengan melakukan kombinasi bisnis, perusahaan akan memperoleh fasilitas yang menguntungkan, terdapat jenis - jenis kombinasi bisnis yang diterapkan menurut PSAK 22 berdasarkan cara penggabungannya yaitu mengenai

1. Pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas Aset neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi.
2. Konsolidasi (penggabungan) Konsolidasi (Penggabungan) ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dan membentuk perusahaan baru.
3. Akuisisi (Pengambilalihan) ketika suatu perusahaan membeli aset dan secara langsung mengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aset yang dibeli dari suatu perusahaan yang diakuisisi.

Perusahaan telah menerima persetujuan resmi dari Biro Layanan Keuangan (OJK) sehubungan dengan proses merger perusahaan yang dipandu. Persetujuan ini diberikan oleh surat dari kepala pengawas pasar modal, dengan angka S-1110/D.0/2019. Rekaman ini dilakukan berdasarkan jumlah AHU-AH 01.10-0008953 dan telah direkam sejak 23 Juli 2019 sehubungan dengan merger ini. Lisensi usaha perusahaan IBJV sebagai perusahaan keuangan juga telah dicabut. Pencabutan lisensi usaha akan berlaku mulai 23 Juli 2019 dan akan secara resmi dituangkan ke dalam surat dari OJK yang dikeluarkan pada 20 November 2019 dengan nomor 113/kD.05/2019. Dengan demikian, semua proses hukum dan administratif terkait penggabungan usaha ini telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. telah menerapkan PSAK 103 tentang Kombinasi Bisnis sesuai dengan ketentuan terbaru tahun 2025, dengan melaksanakan kombinasi bisnis melalui metode akuisisi secara vertikal terhadap PT IBJ Verena Finance (IBJV). Akuisisi ini ditandai dengan peningkatan kepemilikan saham dari 20% menjadi 100%, yang kemudian dilanjutkan dengan penggabungan usaha tanpa likuidasi, di mana seluruh aset dan liabilitas IBJV dialihkan ke PT Mizuho Leasing sebagai entitas induk. Transaksi ini telah dicatat sesuai prinsip akuntansi berbasis nilai wajar dan menghasilkan pengakuan tambahan modal disetor tanpa konversi saham. Dengan demikian, perusahaan telah memenuhi aspek substansi ekonomi, hukum, dan penyajian laporan keuangan yang relevan dan andal sebagaimana diatur dalam PSAK 103. Perusahaan mencatat seluruh saham IBJV sebesar Rp 214,3 juta, dan kas bersih yang dibayarkan setelah dikurangi kas IBJV adalah Rp 117,1 juta. Terdapat selisih nilai tercatat dan nilai wajar aset neto sebesar Rp 32,9 juta yang diakui sebagai “Tambahan Modal Disetor.”

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan jurnal “Analisis Penerapan PSAK 103 Terbaru pada Laporan Keuangan PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk Tahun 2024”. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi yaitu Bapak Aryanto Nur, atas bimbingan dan arahnya selama proses penulisan. Dengan kerja sama yang baik antar rekan satu tim, jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa jurnal ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat membangun demi masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat yang positif bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dinarjito, A. 2020. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Politeknik Keuangan Negara STAN. <https://penerbitan.pknstan.ac.id/> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [2] Fernando, Jason., Kebaikan, David., Velasquez, Vikki. 2024. *Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum (GAAP): Definisi dan Aturan*. investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/g/gaap.asp> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)



- [3] Humaira, S., Ralita, S., Fauzan, N., Ahmad, B. 2024. Perubahan Kombinasi Bisnis Implementasi dan Dampak PSAK 22 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Fairness*. 14(3). 87-93. <https://ejournal.unib.ac.id/fairness> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [4] Ikatan Akuntansi Indonesia. 2025. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Efektif Per 1 Januari 2025. IAI Global. <https://web.iaiglobal.or.id> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2025).
- [5] Indah, E., Khoiriyah, Misyana. 2024. Konstruksi Disiplin Anak Melalui Metode Pembiasaan Pada TK Al Asy'ari Kabupaten Bondowoso Tahun 2023-2024. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 3(11). 3079-3090. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2025)
- [6] Kartadjumena, E. 2024. Modul Perkuliahan Pelaporan Korporat Kombinasi Bisnis dan Laporan Konsolidasian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. <https://www.scribd.com/document/780208814/KOMBIS> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2025)
- [7] Kurniawan, Afrit. 2017. Studi Komparasi Kinerja Bank Syariah di Indonesia dengan Menggunakan *Income Statement dan Value Added Statement* Melalui *Two Stage Dea* Tahun 2010-2014. Masters thesis, STAIN Kudus. <http://repository.iainkudus.ac.id/1078/> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [8] Luhmad. 2020. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). id.scribd.com. <https://www.scribd.com/document/486436352/prinsip-akuntansi-berterima-umum-PABU> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [9] Muvit, Anisa. 2017. Tugas teori akuntansi review standar akuntansi. Slideshare. <https://www.slideshare.net/slideshow/tugas-teori-akuntansi-tentang-review-standar-akuntansi/73343834> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [10] Polapa, Adelina Livia. 2021. Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Rembang Bangun Persada. *Diploma thesis*, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. <http://eprints.perbanas.ac.id/8206/> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [11] PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. 2025. Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 Dan 2023 Dan Laporan Auditor Independen. https://www.mizuho-ls.co.id/lib/files/LC_AUDITED_FINANCIAL_STATEMENT_MLI_24121.pdf (Diakses pada tanggal 1 Mei 2025)
- [12] Setiani, R., Erlita, R. 2024. Analisis Implementasi PSAK No. 1 pada Laporan Keuangan PT. Angkasa Pura II. *Jurnal Akuntansi*. 19(1). 50-63. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3753> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [13] Siallagan Hamonangan, S. M. 2020. *Buku Teori Akuntansi Edisi Pertama*. LPPM UHN Press. <https://repository.uhn.ac.id> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [14] SoM, PPM. 2023. Etika Akuntansi: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. *PPM School of Management*. <https://www.ppmsschool.ac.id/etika-akuntansi/> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [15] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (4th ed.). Alfabeta.
- [16] Suwardjono. 1991. Kerangka Kerja Prinsip Akuntansi Berterima Umum Indonesia. *Majalah Akuntansi*. <https://pipitwahyuni5.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/06/artikel03.pdf> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [17] Syaharman. 2021. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan pada PT. Narasindo Mitra Perdana. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*. 4(2) 283-295. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/index> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [18] The IFRS Foundation. 2025. *IFRS 3 Business Combinations*. IFRS. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-business-combinations/> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025)
- [19] Widiana, Dian dkk. 2023. Analisis Penerapan PSAK 1 pada Laporan Keuangan Perusahaan Rokok yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Digital (JAMED)*. 3(1). 1-3. <https://garuda.kemdikbud.go.id/> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2025)